

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor publik yang terdapat di Indonesia terus mengalami perkembangan, dengan adanya akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik. Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari instansi pemerintahan kepada masyarakat umum.

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan yang bersumber dari kekayaan selama satu tahun anggaran. Di dalam pemerintahan laporan keuangan juga digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun oleh pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah atau yang disebut sebagai Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Wewenang untuk menyusun laporan keuangan diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola dan menyusun laporan keuangannya sendiri.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki tujuan umum yaitu untuk memberikan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat untuk para penggunaannya dalam mengambil atau mengevaluasi suatu keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dalam Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dijelaskan

bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 dijelaskan juga bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu penilaian mengenai baik buruknya atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan yang memeriksa, menilai, dan juga memberikan opini tentang kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setiap satu periode Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemeriksaan ini dilakukan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WPD), Tidak Memberi Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW).

Berdasarkan sumber data dari Siaran Pers BPK Perwakilan Provinsi NTT menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pemeriksaan tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ende yaitu

pengelolaan insentif pemungutan pajak daerah tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang atas 13 paket pekerjaan pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengelolaan belanja tak terduga untuk kegiatan jaring pengaman sosial belum sepenuhnya tertib, dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintahan Kabupaten Ende juga belum sepenuhnya tertib. Jadi dengan adanya beberapa masalah ini maka perlu adanya suatu perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik lagi.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk bisa melaksanakan atau melakukan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pengetahuan yang dimiliki dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang baik. Sumber daya manusia merupakan pokok dasar utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha menciptakan dan mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang terpenting di dalam suatu organisasi.

Berdasarkan data dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Ende Tahun 2016 menyatakan bahwa Kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Ende masih jauh dari harapan, hal ini dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Data Susenas yang menjelaskan tentang data keterangan pendidikan menunjukkan pada tahun 2015 di Kabupaten Ende tersebut memperlihatkan bahwa banyak penduduk yang tidak memiliki ijazah dan hanya tamatan pendidikan sekolah dasar ($\pm 58\%$). Penduduk yang menamatkan

Pendidikan SD sebesar (0,20), SMP (0,03), SMA (3,28) dan pendidikan yang menamatkan pendidikan tinggi (tingkat universitas) relative kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Ende. Hal ini mengakibatkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih jauh dari harapan. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan harapan. Hal ini didukung oleh penelitian Shintia, Cok Istri Agung Prami & Erawati, Ni Made Adi (2017) dan Oktavia, Shintami & Rahayu, Sri (2019) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sementara hasil penelitian Manimpurung, dkk (2018) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Erawati, Teguh & Abdulhadi, Muhammad Rifas (2018) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurut Halim (2012:35) sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Sistem akuntansi keuangan yang digunakan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Keuangan. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan adalah program keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu: penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban untuk membantu pemerintah dalam pengolahan data yang lebih mudah, akurat, dan serta efisien. Sistem akuntansi pada tingkat pemerintah daerah diatur oleh gubernur / bupati / walikota, hal ini mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Penggunaan sistem akuntansi keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik sistem akuntansi keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda yang bersangkutan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Megawati, Luh Kadek Sri dan Sulindawati, Ni Luh Gede Erni (2015) menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti, Emilda (2014) menunjukkan hasil bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Komitmen organisasi merupakan sebagai keterkaitan agar pegawai tetap terus mempertahankan keanggotaan organisasi/entitas dimana pegawai tersebut bekerja. Dengan adanya komitmen disuatu organisasi, maka pegawai akan tetap

terus bertanggungjawab atas setiap pekerjaan yang diberikan. Komitmen organisasi dibangun atas unsur dasar kepercayaan kepada pekerja dan atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja untuk membantu mewujudkan visi dan misi organisasi/entitas dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota di dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) untuk bekerja terhadap organisasi. Jika seorang pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga dia mempunyai tanggung jawab dan ketekunan dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga semakin tinggi komitmen organisasi maka akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Endianto, dkk (2017) dan Mutiana Liza, dkk (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan Manimpurung, dkk (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Kerja Pemerintah Daerah (LKPD).

Sistim informasi akuntansi merupakan salah satu komponen dari suatu organisasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyiapkan informasi keuangan agar dapat membantu para akuntan untuk pengambilan keputusan. Menurut Anggraeni, Desiana (2014) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem yang dimulai dari

pengelompokkan, penggolongan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (PEMDA). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Wahyudin (2017), Tawaqal dan Suparno (2017) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Abdulhadi, Firas (2018) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) tidak dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Penelitian ini sangat penting agar dapat mengetahui Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari uraian diatas, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk dapat memudahkandalam penelitian yang terfokus sitemastis, penulis

mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis diharapkan dapat memahami dengan baik tentang pengaruh

kapasitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya dapat membantu untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan berkualitas.
3. Bagi institusi Pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai mengapa topik ini diangkat, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang mendukung penelitian, serta ringkasan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

3. Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi metode rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrument penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data

4. Bab 4 Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data

Bab ini membahas tentang gambaran umum subyek penelitian serta analisis data yang meliputi analisis deskriptif, analisis statistik, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda serta pembahasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis.

5. Bab 5 Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian, dan saran kepada pihak terkait maupun penelitian berikutnya.